

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air dan ditujukan bukan hanya untuk satu golongan, atau sebagian masyarakat saja, melainkan untuk seluruh tanah air dan seluruh masyarakat. Dengan demikian maka pembangunan dilaksanakan di seluruh wilayah baik di desa maupun di daerah perkotaan.

Pembangunan adalah gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan ini lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan serta pembangunan bangsa. Pembangunan merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu memerlukan penerahan segala budidaya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban umat manusia.

Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadi perubahan struktur fisik ataupun material, tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamakan aspek-aspek dari kehidupannya sehari-hari.

Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan. Untuk memeratakan pembangunan digunakan pendekatan perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi, sehingga setiap bagian yang khas (dapat juga menurut satuan daerah

satuan tatapraja atau daerah administrasi). Disamping itu diperlukan juga desentralisasi yaitu kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah regional dan lokal. Dalam desentralisasi itu harus terdapat koordinasi yang baik.

Pembangunan memiliki makna multidimensional, maka ia dipandang sebagai suatu proses yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan intuisi-intuisi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan masalah kemiskinan.

Pembangunan tidak terlepas dari penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan keterkaitan aktivitas manusia dengan sebidang lahan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak manusia yang bermukim pada suatu wilayah, maka semakin besar intervensi manusia dalam mengubah fungsi lahan untuk berbagai bentuk macam kegiatan. Perubahan fungsi lahan tersebut akan menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan.

Bertambahnya penduduk erat kaitannya dengan dinamika pembangunan yang berakibat pada terjadinya permasalahan dalam penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan, yakni antara lain; luas penguasaan dan kepemilikan lahan yang semakin sempit, konflik dalam penguasaan, kepemilikan dan peruntukan lahan, berkurangnya luas lahan pertanian produktif terutama sawah beririgasi teknis dan sebagainya. (Sugiharto : 2007).

Sejalan dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat informasi yang diperlukan dalam menetapkan perencanaan dan kebijakan pembangunan semakin meningkat, antara lain memerlukan kelengkapan-kelengkapan yang mampu menjelaskan dan menjabarkan tujuan dan arahan pembangunan dalam dimensi yang lebih konkrit. Dengan

demikian proses pembangunan yang berlangsung tidak akan menimbulkan kendala ataupun benturan-benturan antara bidang maupun antara sektor.

Program jangka pendek dan menengah berupa pola dasar pembangunan daerah belum cukup membendung dan mengantisipasi kendala-kendala pembangunan. Kesenjangan antara sektor dan wilayah pembangunan masih terlihat, hal ini mencerminkan kurang efektifnya interaksi fungsi sektor-sektor tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurang tepat menempatkan konstelasi lingkungan yang serasi dan selaras. Oleh karena itu di samping perencanaan yang telah ada, diperlukan pemanfaatan ruang sebagai upaya pengendalian untuk mengatasi kepelikan masalah penyebaran penduduk dan tenaga kerja di kawasan tertentu, di antaranya kawasan permukiman, penetapan kawasan produktif dan penetapan kawasan pelayanan.

Lahan merupakan sumber daya alam yang strategis bagi pembangunan, hampir semua sektor pembangunan fisik seperti perumahan, pertambangan dan transportasi. Dengan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang pesat tekanan terhadap penggunaan lahan semakin meningkat, misalnya hutan dijadikan areal pertanian, sementara lahan pertanian di pulau Jawa dijadikan telah ada permukiman (Bintarto:1999).

Penggunaan lahan merupakan interaksi antara dua faktor yaitu faktor manusia dengan faktor lahan. Manusia merupakan faktor yang mempengaruhi atau yang melakukan kegiatan terhadap lahan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan lahan faktor yang dipengaruhi sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat mencari nafkah. Penggunaan lahan itu sendiri timbul sebagai akibat adanya perubahan antara jumlah penduduk dengan luas lahan yang tersedia.

Pembangunan lahan pertanian atau persawahan merupakan interaksi antara manusia dengan alam lingkungannya. Interaksi dalam hal ini berupa penggunaan lahan dalam berbagai bentuk. Kedudukan lahan pertanian baik yang sifatnya kering maupun basah sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupannya.

Lahan sawah tidak hanya penting sebagai padi dan palawija yang merupakan barang privat (privat goods) yang memberikan keuntungan bagi petani, tetapi juga memberikan barang dan jasa publik (public service) yang dikenal dengan istilah multifungsi. Berbagai multifungsi yang penting antara lain penopang ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, penjaga kelestarian budaya, memberikan suasana nyaman pedesaan, serta berbagai jasa lingkungan lainnya.

Fungsi positif atau dapat juga disebut dengan eksternalitas positif (positive externalities) lingkungan lahan sawah antara lain adalah untuk mitigasi atau pengendalian banjir, mendaur ulang air, pengendalian atau pengontrol erosi, mitigasi peningkatan suhu udara, dan mendaur limbah organik. Namun demikian terdapat beberapa masalah berupa eksternalitas negatif (negative externalities) dari lahan sawah antara lain adalah emisi gas metan.

Alasan yang menyebabkan tingginya tingkat alih guna lahan antara lain adalah karena investasi di bidang nonsawah (setidak-tidaknya dalam jangka waktu pendek) jauh lebih menjanjikan. Bahkan menurut Syafa'at dkk (1995) dalam Sumaryanto (2001) di sekitar pusat pembangunan, nilai rente (sewa) lahan sawah dibandingkan dengan lahan untuk permukiman dan industri berturut-turut bisa mencapai 1 : 622 dan 1 : 500. Lagi pula budi daya padi sawah memerlukan tenaga kerja, biaya pembelian pupuk dan obat-obatan yang tinggi, namun harga jual berasnya sangat rendah. (Fahmuddin dan Irawan : 2000)

Kecamatan Pining merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Gayo Lues dengan luas wilayah 1100 KM². Sawah pada Kecamatan Pining tergolong luas yaitu 560 Ha pada 2006, dengan penghasilan 2 957,3 ton setiap tahun. Pada 2011 lahan pertanian sawah semakin berkurang, jumlahnya yaitu 401 Ha. Hal ini menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik dan non fisik Kecamatan Pining. Peneliti tertarik untuk mengetahui kondisi fisik dan non fisik apa yang berubah setelah terjadi alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman di Kecamatan Pining.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah perlu dirumuskan untuk memperjelas masalah yang akan diteliti serta memberi arah sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Perubahan penggunaan lahan persawahan menjadi permukiman dilihat dari kondisi fisik (luas) Kecamatan Pining.
2. Perubahan penggunaan lahan persawahan menjadi permukiman dilihat dari kondisi non fisik (pendapatan dan mata pencaharian).

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah dampak alih fungsi lahan persawahan menjadi permukiman terhadap kondisi fisik (luas lahan sawah) dan nonfisik (mata pencaharian dan pendapatan) di Kecamatan Pining.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perubahan penggunaan luas lahan sawah menjadi permukiman di Kecamatan Pining pada tahun 2006 s/d 2011?
2. Bagaimana perubahan penggunaan lahan persawahan menjadi pemukiman dilihat dari mata pencaharian dan pendapatan di Kecamatan Pining pada tahun 2006 s/d 2011?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan luas lahan sawah menjadi permukiman di Kecamatan Pining pada tahun 2006 s/d 2011?
2. Untuk mengetahui penggunaan lahan persawahan menjadi pemukiman dilihat dari mata pencaharian dan pendapatan di Kecamatan Pining pada tahun 2006 s/d 2011?

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bahan masukan bagi pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan pembangunan permukiman yang berwawasan lingkungan.
2. Bahan masukan bagi masyarakat Kecamatan Pining
3. Bahan masukan bagi peneliti sendiri, dalam hal ini bertambahnya pengetahuan tentang dampak pembangunan permukiman terhadap tata guna lahan persawahan.

4. Bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berniat untuk meneliti objek yang sama di daerah lain dengan pelaksanaan penelitian yang lebih teliti sehingga dapat memberikan kontribusi yang optimal.



THE
Character Building
UNIVERSITY

